



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA

JURUSAN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HALU OLEO

Volume 3, Nomor 1, Februari 2014



Pengobatan Tradisional Suku Bajo
di Desa Tanjung Pinang
Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna

Kajian Ekolinguistik terhadap
Ketergerusan Leksikon Kesaguan
pada Masyarakat Tolaki
di Kabupaten Konawe

Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradisi:
Satu Tinjauan Arkeologi

Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi
Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara

Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi
Anak Usia Sekolah pada Pendidikan Dasar
dan Menengah di Desa Cempedak
Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan
Wua-wua Kota Kendari

Model Kemitraan untuk Mewujudkan Program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan
terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan
di Sulawesi Tenggara

Buruh Migran Perempuan: Identifikasi
terhadap Perlindungan dan Pemberdayaannya
di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe

Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal
Dominan dalam Komunikasi
Anak Tunarungu

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
VOL.03-NO.01- Februari 2014
ISSN: 2252-9144

Penasihat

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab

Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi

Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi

Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsa, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Mitra Bestari

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Munsil Lampe, M.A. (Unhas).

Tata Usaha

Hadrianti
Reni

Sirkulasi

Alham Haidir
Safri
Yusran Saeda
Muh. Okmi Heriansyah

Kuangan

Risnawati

Etnoreflika Online

Fina Amalia M. S.Pd., M.Hum.
Edo Sanjani
Adi, S.Sos

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit,
Ruang Jurusan Antropologi F I B,
Universitas Halu Oleo, Kendari 93232

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnorefika Volume 3 Nomor 1 bulan Februari tahun 2014 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnorefika Volume 3 Nomor 1, Februari 2014, memuat tulisan sebagai berikut:

- Pengobatan Tradisional Suku Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
- Kajian Ekolinguistik terhadap Ketergerusan Leksikon Kesaguan pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe.
- Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradisi : Suatu Tinjauan Arkeologi.
- Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara.
- Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah pada Pendidik Dasar dan Menengah di Desa Cempedak Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
- Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.
- Model Kemitraan untuk Mewujudkan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara.
- Buruh Migran Perempuan : Identifikasi terhadap Perlindungan dan Pemberdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal Dominan dalam Komunikasi Anak Tunarungu.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Nasruddin Suyuti La Ode Aris	381-389	Pengobatan Tradisional Suku Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna
Aris	390-399	Kajian Ekolinguistik Terhadap Ketergerusan Leksikon Kesaguan pa- da Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe
Abdul Rauf Suleiman	400-415	Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradi- si : Suatu Tinjauan Arkeologi
Basrin Malemba	416-433	Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara
La Janu	434-442	Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah pada Pendidik Dasar dan Menengah di De- sa Cempedak Kecamatan Laonti Ka- bupaten Konawe Selatan
Makmur Kambolong	443-454	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Ma- taiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari
Ashmarita	455-465	Model Kemitraan Untuk Mewujudkan Program Tanggung Ja- wab Sosial Perusahaan Pertambangan Terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara
Laxmi	466-488	Buruh Migran Perempuan : Identifi- kasi Terhadap Perlindungan dan Pem- berdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe
Marsia Sumule Genggong Gista Yanuarti	489-495	Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal Dominan dalam Komunikasi Anak Tunarungu

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTRAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN MATAIWOI
KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI¹**

Makmur Kambolong²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library study*) dan studi lapangan (*field study*) yaitu dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mataiwoi selama Tahun 2011-2012 terdiri atas 3 bidang, yaitu 1) Bidang Lingkungan, yaitu berupa : pembuatan sumur gali umum, rehab rumah tidak layak huni, dan penimbunan jalan yang hasil mencapai 100 persen terlaksana. 2) Bidang Sosial, yaitu terdiri atas santunan cacat dan yatim piatu, beasiswa, sunatan dan pemberian santunan jompo janda dan duda. Program pada bidang ini berhasil dengan baik karena dukungan dan partisipasi masyarakat. 3) Bidang Ekonomi, yaitu dilaksanakan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan menyalurkan berbagai kredit mikro untuk kegiatan peningkatan pendapatan dan membiayai pembangunan infrastruktur dalam skala kecil. Kemudian program pemberdayaan di bidang ekonomi dalam bentuk pinjaman dana bergulir dengan tujuan membantu peningkatan daya beli masyarakat atau pendapatan bagi warga miskin. Bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam bidang ekonomi adalah berupa pedagang ikan keliling, pedagang ikan di pasar, usaha kios, usaha pembuatan kue, dan usaha-usaha lainnya yang dianggap masih layak menerima bantuan.

Kata kunci : implementasi PNPM, kesejahteraan, masyarakat miskin

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the implementation of the National Program for Urban Community Empowerment in improving poor social prosperity in Mataiwoi, sub district of Wua-Wua, Kendari City. The method of this study is descriptive qualitative. Data was collected by library and field study such as observation, interview, and questioners. The data was analyzed by the technique of descriptive qualitative analysis. The result of this study found that PNPM Urban in the Mataiwoi Village during the year of 2011-2012 consisted of three areas, namely 1) Environment Field, which were: the manufacture of common wells, rehabilitation of unfit houses for habitation, and the accumulation path that results reach 100 percent done. 2) Social Affairs, it consists of

¹Hasil Penelitian

²Staf Pendidik pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232.

disabled and orphan benefits, scholarships, circumcision, and granting compensation elderly widows and widowers. 3) Economic Affairs, which is implemented through Bantuan Langsung Tunai (BLM) to distribute a variety of micro-credit for income generating activities and to finance small-scale infrastructure development. Then, the economic empowerment program in the form of a revolving loan fund with the aim to help increase people's purchasing power or income for the poor. Form of the work done by the poor in the economic field are fish traders, fish traders in the market, kiosk, cake making business, and other businesses that eligible to receive assistance.

Key words: *implementation of PNPM, prosperity, poor society*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Sumoediningrat (1998), mengemukakan bahwa “Kemiskinan ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan penduduk”. Sedangkan menurut Emil Sali (Abdul Sani, 1993) adalah “Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain”.

Sebagaimana rekomendasi dari badan internasional yakni WHO/FAO (World Health Organization/ Food Agriculture Organization) “Jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia, masing-masing 1900 kalori dan 40 gram protein / hari / orang”. Jadi secara umum pengkategorian miskin di atas adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau konsumsi nyata, meliputi pangan, sandang dan papan, karena tidak memiliki mata pencaharian tetap dan jumlah tanggungan yang banyak. Kondisi masyarakat yang demikian me-

ngharuskan pemerintah setempat berusaha keras dengan melakukan pemberdayaan kepada mereka untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemakmuran berupa meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan sendiri merupakan hasil produksi yang meningkat. Proses demikian dapat berlangsung baik apabila asumsi-asumsi pembangunan, yakni adanya kesempatan kerja secara penuh, tiap orang memiliki kemampuan yang sama dan semua pelaku ekonomi bertindak rasional terpenuhi. Namun dibalik pembangunan tersebut yang terus digalakan pada sisi lain muncul masalah kemiskinan terutama di wilayah perkotaan dengan ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Untuk menanggulangi personalan kemiskinan di perkotaan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Program tersebut diharapkan menjadi upaya untuk mengokohkan keberdayaan masyarakat dan institusi komunitas masyarakat perkotaan terutama komunitas masyarakat miskin agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dija-

lankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dari pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan lembaga yang ada di komunitas mereka.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dilaksanakan sejak Tahun 2007 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar, dan menguat bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Salah satu persoalan yang diakibatkan oleh perkembangan kota pada umumnya termasuk di Kelurahan Mataiwoi ini adalah adanya kecenderungan munculnya permasalahan-permasalahan sosial, seperti semakin banyaknya anak yang putus sekolah, rendahnya kualitas perumahan masyarakat, kriminalitas dan kenakalan remaja, pengangguran dan pencemaran lingkungan dimana gejala-gejala seperti ini merupakan faktor pendorong munculnya kawasan atau kantong kemiskinan di kawasan perkotaan.

Adanya permasalahan kemiskinan di perkotaan mendorong aparat pemerintah mengupayakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) guna merespon permasalahan kemiskinan yang ada di daerah tersebut, khususnya di Kelurahan Mataiwoi namun berdasarkan hasil penelitian awal menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mataiwoi tersebut terdapat masalah seperti pelaksanaan pada bidang ekonomi.

Dengan adanya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), diharapkan membawa perubahan pada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat mengurangi permasalahan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh stakeholder PNPM Mandiri Perkotaan dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mataiwoi Jaya bersama-sama masyarakat Kelurahan Mataiwoi dapat mampu mengoptimalkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan agar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan menyajikan pengetahuan dan kajian implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

Pressman dan Wildasky (Mufty, 1992) memandang implementasi sebagai suatu proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian implementasi menjadi jaringan dan mampu mengaitkan hubungan yang menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang memungkinkan pencapaian hasil yang diinginkan. Karena itulah unsur yang saling terkait merupakan konsep penting dari implementasi.

Alison (Abdullah, 1987) mengemukakan bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijaksanaan. Sebelum suatu program atau proyek dilaksanakan, dilakukan persiapan yang matang tentang segala hal yang menyangkut proyek, misalnya organisasi, tenaga kerja. Termasuk kualifikasi orang-orang yang terlibat di dalamnya, dana dan perlengkapan serta prosedur kerja yang mengikat semua pihak yang terlibat.

Mempelajari masalah implementasi kebijaksanaan berarti berusaha untuk memahami apa kenyataan yang terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa.

Sejalan dengan Alison, Daniel A. Masmanian pada Paul A. Sabatier (Solihin, (1997) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses, sebagai hasil (output) dan sebagai akibat (outcome).

Edward dan Sharhansy (Abdullah, 1988) mengemukakan bahwa *"implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goal and action geared to achieving them"* (implementasi adalah suatu gambaran tentang strategi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai).

Selanjutnya Meemont Brindle (Abdullah, 1988) *"implementation of general process of administration action that can be inverted at a specific program level"* (implementasi adalah suatu proses pelaksanaan tujuan administrasi secara umum yang kemudian ditindak lanjuti dalam tingkatan program yang bersifat spesifik).

Unsur kedua dari implementasi kebijaksanaan adalah adanya kelompok sasaran (penerima) manfaat kebijaksanaan. Kelompok ini sering disebut target group *"client"* obyek atau dengan meminjam istilah Jones (1984) para *abiders*. Hal ini berbeda

dengan rumusan lainnya, antara lain dari Dunn (1981) tidak menyatakan secara eksplisit adanya kelompok sasaran dan hanya menyebutkan tiga faktor yang saling berhubungan yakni kebijaksanaan sendiri, para stakeholder, dan lingkungan kebijaksanaan. Kelompok sasaran (target group) dari suatu kebijaksanaan adalah organisasi-organisasi ataupun anggota-anggota dalam masyarakat sebagai obyek positif dari kebijaksanaan dalam arti keadaannya diharapkan dapat berubah dan memberi dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran diistilahkan oleh Grindle (1980) sebagai hasil akhir berupa dampak dari implementasi kebijaksanaan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.

Kelompok sasaran tersebut memiliki kondisi dan peranan tertentu oleh sebab itu kelompok ini perlu mendapat perhatian tersendiri bagi pengambilan keputusan karena dapat menjadi indikator untuk mengetahui efektifitas kebijaksanaan dalam arti seberapa jauh kebijaksanaan telah ditentukan itu benar-benar memperhatikan kepentingan publik secara optimal dan pelaksanaannya mencapai sasaran yang direncanakan atau seberapa jauh telah memperbaiki kondisi kelompok sasaran yang dimaksudkan Mustopadidjaja (1944).

Unsur yang ketiga dari implementasi kebijaksanaan adalah unsur pelaksanaan (pelaku) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam proses implementasi. Pelaksana kebijaksanaan ini oleh sebagian ahli disebut sebagai aktor atau sering pula diistilahkan *"Stake Holders"* Dunn (1981).

Jones (1991) mengemukakan tiga pilar implementasi yakni (1) pengorganisasian yakni penataan kembali sumber daya unit-unit serta metode untuk menjalankan program; (2) interpretasi yakni aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; dan (3) aplikasi ya-

itu memberikan kelengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau aktivitas lainnya sesuai dengan tujuan pro-gram.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu gambaran tentang strategi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai dan memerlukan kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaannya untuk tercapainya tujuan.

1. Konsep Kemiskinan

Definisi umum kemiskinan adalah masyarakat berada pada suatu kondisi serba terbatas baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai *“Poverty is concern with absolute standart of living of part of society the poor in equality refers to relative living standart across the whole society”*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan adalah terkait dengan batas absolut standart hidup sebagai masyarakat miskin (Sumodiningrat dan Gunawan, 1996).

Deepa Nerayan (Parwoto, 2007) menyatakan bahwa ada empat dimensi utama definisi kemiskinan yang dirumuskan oleh masyarakat miskin sendiri yakni (1) dimensi material kekurangan pangan, lapangan kerja dengan muaranya adalah kelaparan atau kekurangan makanan; (2) dimensi psikologi seperti ketidakberadaan (powerlessness), tidak mampu berpendapat (voicelessness), ketergantungan (dependency), rasa malu (shame), rasa hina (humiliation); (3) dimensi akses pelayanan prasarana yang praktis tidak dimiliki; (4) dimensi aset/milik praktis tidak memiliki aset sebagai modal untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak seperti (a) kapital fisik (*physical capital*), antara lain menyangkut tanah, ternak, peralatan kerja, hunian, perumahan dan sebagainya; (b) kapital manusia (*human capital*), antara lain menyangkut

kesehatan, pendidikan dan pekerjaan; (c) aset sosial (*social capital*) atau sering diartikan sebagai sistem kekerabatan yang mendukung kaum miskin untuk tetap bertahan hidup; (d) aset lingkungan (*environmental asset*) mencakup iklim dan musim yang sangat berpengaruh pada petani, nelayan dan sebagai pekerja lapangan.

Menurut John Friedman (1992) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksaamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau aset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lain-lain). Sumber-sumber keuangan (income dan kredit memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi, dan lain-lain); network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, dan lain-lain; pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective-action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial (Supriyanto, 2004).

Nugroho (2004) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses menjadi, bukan sebuah proses instant. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitas, dan pemberdayaan. Tahapan penyadaran berorientasi pada pemberian pemahaman dan pendayaan. Tahap penyadaran berorientasi pada pemberian pemahaman terhadap pendidikan dan keterampilan, tahapan pengkapasitasan mengarah pada pemberian kekuatan dan kemam-

puan untuk melaksanakan pekerjaan sedangkan tahapan pendayaan lebih diutamakan pembentukan sikap dan prilaku. Rapparport (Nugroho, 2006) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses, suatu mekanisme dalam hal ini individu, organisasi, dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi.

Strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat menurut Alamsyah (2002) yakni (1) mengembangkan komunikasi lingkungan; (2) mengintegrasikan aliansi mitra strategi ke dalam program lingkungan; (3) melakukan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran.

3. Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Selanjutnya untuk memberdayakan masyarakat miskin terdapat kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan di Bidang Lingkungan

Komponen kegiatan yang salah satunya dapat didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah terkait dengan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan pemukiman yang melibatkan masyarakat dan disertai adanya pengendalian mutu dan adanya proses pengawasan, pengeloan serta pemeliharaan guna mendukung kebutuhan masyarakat sesuai cita-cita mereka.

2. Kegiatan di Bidang Sosial

Kegiatan ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkuat ikatan sosial (*social cohesion*) dengan menggalang kepedulian/solidaritas, kebersamaan dan menumbuhkan kepercayaan dengan menggerakkan kapasitas sosial di masyarakat.
- b. Meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat paling miskin dan rentan melalui peningkatan pelayanan sosial langsung bagi kelompok masyarakat paling miskin dan masyarakat rentan.
- c. Menumbuhkan kebiasaan untuk mengelola program sosial yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi kegiatan.

3. Kegiatan di Bidang Ekonomi

PNPM Mandiri Perkotaan memberikan pinjaman bergulir yang berupa usaha simpan pinjam dalam rangka mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dan memberikan dana hibah untuk dikelola dan digunakan dalam membangun sarana dan prasarana dasar lingkungannya yang dapat menunjang kegiatan ekonomi produktif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian di dilaksanakan di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dengan cara: (1) studi kepustakaan (*library study*) yaitu teknik pengumpulan data dan informan melalui berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, *website*, majalah, brosur, surat kabar, dan sumber bacaan lainnya yang relevan; (2) studi lapangan (*field study*) yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner.

C. GAMBARAN UMUM WILAYAH MATAIWOI

Luas wilayah Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua adalah 320 Ha. Penggunaan lahan di kelurahan pada umumnya

untuk lokasi perumahan/pemukiman yaitu seluas 44,4 Ha, seperti rumah tinggal penduduk, kios dan toko maupun untuk keperluan bangunan kantor. Sedangkan sisanya digunakan untuk areal perkebunan/pertanian dengan luas 259 Ha dan sisanya digunakan untuk keperluan lainnya. Berdasarkan tersebut, mengindikasikan bahwa Kelurahan Mataiwoi merupakan kawasan pemukiman padat yang berada di Kecamatan Wua-Wua.

Penduduk Kelurahan Mataiwoi berdasarkan monografi Tahun 2013 berjumlah 5.363 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 2.490 jiwa laki-laki dan 2.873 jiwa perempuan dengan kepala keluarga sebanyak 1.072 KK. Etnis yang mendiami wilayah Kelurahan Mataiwoi cukup homogen, yakni suku Tolaki mencakup 1.508 jiwa, suku Muna 1.779 jiwa, suku Bugis 438 jiwa, suku Jawa 329 jiwa, suku Toraja 215 jiwa, suku Buton 384 jiwa dan suku Bali 113 jiwa.

Lapangan kerja yang tersedia sebagai mata pencaharian bagi penduduk Kelurahan Mataiwoi sangat bervariasi yakni sebanyak 12 jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh 1.555 orang dari jumlah penduduk. Keadaan tersebut menggambarkan salah satu ciri perkembangan kehidupan perkotaan dengan banyaknya atau bervariasinya pilihan untuk berusaha. Di samping itu pula seperti pegawai negeri, TNI, Pedagang, pengrajin, tukang batu dan lain-lain.

Jumlah penduduk miskin dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM Mandiri perkotaan di Kelurahan Mataiwoi merupakan hasil survei yang dilakukan oleh masyarakat secara seksama melalui kegiatan pemetaan swadaya, kriteria dan indikator kemiskinan bersifat lokal dan berdasarkan subyektifitas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kategori Keluarga MisKin Kelurahan Mataiwoi, Tahun 2012

No	Kriteria	Pendapatan Perkapita		Jml Kk	Persentase(%)
		Pertahun	Perbulan		
1	Termiskin (K1)	<500.000	<50.000	74	65,48
2	Sangat Miskin (K2)	500rb-750rb	50rb-75rb	26	23, 00
3	Miskin	750rb-1 Jt	75rb-100rb	13	11,25
Total				113	100,00

Sumber: dokumen PJM-Pronangkis, Tahun 2011

Sesuai dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah Tahun 2004 lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah aspirasi masyarakat desa dan kelurahan adalah Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

D. IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN MATAIWOI

1. Bidang Lingkunga

Adanya keikutsertaan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan program tersebut dengan fokus pada pengendalian dan pelestarian lingkungan. Berbagai permasalahan yang ada di masyarakat miskin perkotaan antara lain pencemaran dan kerusakan alam, pemukiman kumuh, tinggal di kawasan ilegal dan tidak berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan tersebut merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada program PNPM Mandiri Perkotaan pada bidang lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian pada kegiatan dibidang lingkungan berupa kegiatan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Mataiwoi berupa pembuatan sumur gali umum, rehab rumah tidak layak huni, dan penimbunan jalan. Pelaksanaan kegiatan PNPM di bidang lingkungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan PNPM di Bidang Lingkungan, Tahun 2011-2012.

No	Nama KSM	Tahun	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Terampil	2011	Penimbunan jalan (100 M)	15.000.000,-
2	Mandiri	2011	Pembuatan sumur gali (2 unit)	30.000.000,-
3	Kuncup	2011	Pembuatan deker (2 unit)	18.000.000,-
4	Bina Mulia	2012	Rehab rumah (2 unit)	70.000.000,-
5	Aneka	2012	Pengaspalan jalan (100 M)	100.000.000,-
6	Tetaka	2012	Pembuatan sumur gali (2 unit)	30.000.000,-
Total				263.000.000,-

Sumber Data: Laporan Bulanan BKM Mataiwoi Jaya, Tahun 2011-2012

Hasil Wawancara dengan salah satu warga yakni bahwa program PNPM di-bidang lingkungan di Kelurahan Mataiwoi pelaksanaannya sudah nampak sekali. Misalnya penimbunan jalan. Sebelum ada PNPM Mandiri jalan sangat berlubang dan kalau musim hujan jalannya sangat berlumpur. Namun setelah ada PNPM Mandiri dengan kegiatan penimbunan jalan, maka sekarang jalannya sudah bagus dan tidak becek lagi karena ditimbun dengan sirtu dan pasir. Selain itu, ada juga pembuatan sumur gali dan masyarakat sangat bersyukur karena dapat merasakan manfaatnya.

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan di Kelurahan Mataiwoi, Tahun 2013

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Terlaksana	12	52,18
2	Cukup	11	47,82
3	Terlaksana Kurang Terlaksana	-	-
Jumlah		23	100,00

Sumber: Hasil Olahan kuesioner Tahun 2013

Berdasarkan data di atas, program PNPM Mandiri Perkotaan dibidang lingkungan menunjukkan bahwa dari 23 orang responden, 12 orang atau 52,18% menyatakan terlaksana. Artinya realisasi dari program PNPM Mandiri Perkotaan di bidang lingkungan ini dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan dan juga manfaat dari program tersebut cukup dirasakan oleh masyarakat setempat sehingga kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Itu dapat

dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh PNPM berupa sumur umum gali sebanyak 4 unit, rehab rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit, pembuatan deker sebanyak 2 unit, pengaspalan jalan sepanjang 100 M yaitu di RT 2 dan penimbunan jalan sepanjang 100 M yaitu di RT 4.

Dengan adanya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dibidang lingkungan ini seperti penimbunan jalan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan Mataiwoi, juga dengan adanya sumur gali dan dengan adanya rehab rumah perumahan yang tidak layak dihuni dapat layak untuk dihuni. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya program PNPM Mandiri Perkotaan ini sangat memberikan manfaat serta dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Sosial

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di bidang sosial ini kegiatannya terdiri atas santunan cacat dan yatim piatu, beasiswa, sunatan, dan pemberian santunan jompo janda dan duda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang ini pelaksanaannya berhasil dengan baik.

Tabel 4. Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Sosial, Tahun 2011-2012

No	Nama KSM	Tahun	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Mekar Abadi	2011	Beasiswa	5.000.000,-
2	Salam	2011	Santunan	5.000.000,-
3	Nunulai	2011	Sunatan	4.500.000,-
4	Anawai	2012	Santunan	4.800.000,-
5	Morini	2012	Sunatan	2.550.000,-
6	Membiri	2012	Beasiswa	6.600.000,-
Total				28.450.000,-

Sumber Data: Laporan Bulanan BKM Mataiwoi Jaya Tahun 2011-2012

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mataiwoi telah dilakukan dalam bidang sosial, seperti santunan cacat dan yatim piatu yang diberikan sebanyak 29 orang, beasiswa diberikan kepada 99 anak yang terdiri dari SD, SLTP dan SLTA, sunatan dan santunan jompo janda dan duda 44 orang.

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap implementasi PNPM di Bidang Sosial

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Berhasil	16	69,56
2	Cukup Berhasil	7	30,44
3	Kurang Berhasil	-	-
Jumlah		23	100,00

Sumber: Hasil Olahan kuesioner Tahun 2013

Hal itu dapat dilihat dari jumlah penerima beasiswa sebanyak 99 orang yang terdiri dari SD sebanyak 43 anak, SLTP 34 anak dan SLTA sebanyak 22 anak. Untuk KSM Mekar Abadi sebanyak 40 anak dan KSM Memberi sebanyak 50 anak dimana masing-masing anak mendapatkan seragam sekolah dan uang sebesar Rp. 55.000,-/anak, untuk sunatan ini jumlah anak yang disunat sebanyak 40 orang, sedangkan yang menerima santunan cacat yatim dan piatu sebanyak 29 orang dimana masing-masing anak mendapatkan Rp. 65.000,-/anak dan santunan jompo, janda dan duda sebanyak 44 orang yang masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,-/orang.

3. Bidang Ekonomi

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai usulan program yang telah dilaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mataiwoi melalui Bantuan langsung Masyarakat (BLM) telah menyalurkan berbagai kredit mikro untuk kegiatan peningkatan pendapatan dan dapat membiayai pembangunan infrastruktur skala kecil. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mataiwoi dimana salah satu program pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu adanya pinjaman dana bergulir dengan tujuan membantu peningkatan daya beli atau pendapatan bagi orang miskin.

Salah satu wujud pada pelaksanaan di bidang Ekonomi berupa adanya pelayanan pinjaman yang diberikan lewat UPK (Unit Pengelola Keuangan) di Kelurahan Mataiwoi, dimana kemudian dana tersebut diteruskanpinjamkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai modal kerja usaha produktif (baik untuk usaha

baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada), maka UPK-BKM harus melakukan kegiatan berdasarkan prosedur operasional standar dalam pengelolaannya. Tujuannya adalah agar proses pengelolaan pinjaman bergulir yang dilaksanakan oleh UPK-BKM menjadi seragam.

Dari hasil penelitian pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mataiwoi di bidang ekonomi yang disalurkan melalui dana PNPM Mandiri Perkotaan tersebut kepada masyarakat miskin untuk dikelola berupa penjual ikan keliling, penjual ikan di pasar, usaha buka kios, usaha pembuatan kue, dan usaha-usaha lainnya yang dianggap masih layak menerima bantuan.

Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi Usaha Kecil, (2011-2012)

No	Nama KSM	Jenis kegiatan	Jumlah dana
1	Maliboro	Usaha pembuatan kue	5.000.000,-
2	Mitra	Usaha bengkel	7.500.000,-
3	Cantik	Usaha salon	7.500.000,-
4	Waraka	Usaha jahit	4.000.000,-
5	Moseu	Usaha penjual ikan keliling	3.000.000,-
6	Asoka	Usaha buka kios	5.000.000,-
Jumlah			32.000.000,-

Sumber data: Laporan BKM Mataiwoi Jaya, Tahun 2011-2012

Khusus untuk kegiatan di bidang ekonomi produktif dengan produk berupa usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BKM Mataiwoi Jaya melalui UPK (Unit Pengelola Keuangan) telah mengalami peningkatan (pengguliran dana) jumlah KSM baru yang menerima dana dari PNPM Mandiri Perkotaan tersebut berjumlah 7 KSM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Bantuan dana PNPM di Bidang Ekonomi Produktif, Tahunn 2011-2012

No	Nama KSM	Jmlh anggota	Jenis kegiatan	Jumlah bantuan	Jmh penri ma
1	Toro meambo	4	Penjual sayur	2.000.000,-	4
2	Mekar	5	Usaha batu bata	2.000.000,-	5
3	Usaha	5	Penjahit	2.000.000,-	5
4	Mepokoaso	5	Kios sembako	2.000.000,-	5
5	Padaidi	5	Kios	2.500.000,-	5

6	Maju lancar	6	sembako Pengelola kayu	3.000.000,-	6
7	Meohai	6	Pengelola kayu	3.000.000,-	6
8	Medulu	6	Peternaka n ayam	5.500.000,-	6
Total		42		22.000.000,-	42

Sumber: Laporan perkembangan dana bergulir UPK Per 31 Desember 2011

Dari data tersebut, terlihat bahwa kegiatan PNPM di bidang ekonomi produktif merupakan kegiatan yang sangat diminati oleh masyarakat Kelurahan Mataiwoi. Ini terbukti dengan bertambahnya jumlah KSM yang mengusulkan kegiatan berupa penjual sayur, usaha batu bata, usaha jahit, kios sembako, pengolah kayu, dan peternakan ayam dengan jumlah anggota sekaligus penerima manfaat seluruhnya sebanyak 42 orang.

Selanjutnya dengan adanya kegiatan PNPM di bidang ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima dana tersebut.

Tabel 8. Jumlah Pengembalian Dana Secara Kolektif, Tahun 2012

No	Nama KSM	Tanggal Pinjaman		Besar Pinjaman Pokok	Sistem Angsuran	Total Tunggalan
		Pencairan	Jatuh Tempo			
1	Toro. M	3/5/2011	3/3/2012	2.000.000,-	Bulanan	1.000.000,-
2	Mekar	3/5/2011	3/3/2012	2.000.000,-	Bulanan	800.000,-
3	Usaha	3/5/2011	3/3/2012	2.000.000,-	Bulanan	800.000,-
4	Mepoko aso	3/5/2011	3/3/2012	2.500.000,-	Bulanan	400.000,-
5	Padaidi	3/5/2011	3/3/2012	3.000.000,-	Bulanan	750.000,-
6	Maju. L	3/5/2011	3/3/2012	3.000.000,-	Bulanan	1.300.000,-
7	Meohai	3/5/2011	3/3/2012	3.000.000,-	Bulanan	2.000.000,-
8	Medulu	3/5/2011	3/3/2012	3.000.000,-	Bulanan	2.000.000,-
Jumlah				22.000.000,-		9.250.000,-

Sumber: Laporan perkembangan keuangan UPK desember 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa perhitungan tingkat pengembalian dana bergulir yang diprogramkan anggota BKM Mataiwoi Jaya Kelurahan Mataiwoi lebih jelas tingkat pengembalian masyarakat mengalami tunggakan. Dengan sistem angsuran bulanan masyarakat peminjam tidak da-

pat mengembalikan secara tepat waktu, dengan pinjaman rata-rata pinjaman per-KSM Rp. 2.000.000,- dan jumlah anggota 4 orang, perorang sebesar Rp. 500.000,- dengan jenis usaha penjual sembako dan angsuran perbulan Rp. 200.000,-.

Dengan demikian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di bidang ekonomi dianggap kurang berhasil. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diperoleh gambaran bahwa kurangnya kemampuan penduduk miskin dalam mengembalikan dana bantuan usaha yang diberikan dalam rangka pemberdayaan membuat mereka terhambat dalam berpartisipasi langsung pada program pemberdayaan berupa pemberian dana.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa (1) hasil program kegiatan di bidang lingkungan dianggap berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) hasil program kegiatan di bidang sosial dianggap berhasil yang ditunjukkan dengan tersalurkannya santunan cacat dan yatim piatu, beasiswa, sunatan dan pemberian santunan jompo janda dan duda kepada masyarakat yang membutuhkan; (3) hasil program kegiatan di bidang ekonomi dianggap kurang berhasil hal ini ditunjukkan dengan jarang masyarakat yang menerima bantuan mengembalikan pinjaman dana bergulir tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Mengacu pada pembahasan dan beberapa kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran-saran (1) dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, usaha ini tidak sebatas pada saat program ini masih berjalan, namun yang diharapkan adalah tingkat partisipasi masy-

arakat secara terus-menerus dan mandiri; (2) dibentuknya lembaga BKM pada dasarnya hanya merupakan wadah kolektif. Namun yang diharapkan adalah anggota masyarakat mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan lebih meningkatkan kesehatan dan peningkatan pendapatan; (3) dalam pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari terhadap pengelola BKM maupun masyarakat penerima bantuan PNPM Mandiri Perkotaan yang tidak mematuhi peraturan maka diberikan teguran dan sanksi tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. M. S. 1987. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research And Case Studies)*, Makalah pada “Temu Kaji Nasional Persadi Pusat” di Ujung Pandang.
- Abdullah, H. M. S. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research And Case Studies)*, Makalah pada “Temu Kaji Nasional Persadi Pusat” di Ujung Pandang.
- Abdul Sani, 1993. *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..
- Alamsyah. 2002. *Strategi Pembangunan Nasional dengan Pendekatan Sumber Daya Manusia*. Artikel. www.bpkp.go.id.
- Arikunto, S. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BAPPENAS. 1997. *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bappenas-pusat P3R-YAE.
- Bardach, E. 1977. *The Implementation Game: What Happens After A Bill Becomes A Law*. Combrige Massachusetts and London, England: The Mit Press.,
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Pemukiman dan prasarana Wilayah. 2003. *Pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*.
- Drindle M. S. 1980. *Politics And Policy Implementation The Third*. Princeton Hall University Press.
- Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Inc. Washington:
- Gilarso. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta.
- Friedman, Jhon. 1992. *Empowennment: The Politics Of Alternative Development*, Blackwell Book, Cambrige: Blackwell Jurnal. www.empowerment.go.id.
- Jones, 1991. *Indikator Pembangunan Manusia dan Penduduk*. Jakarta: Prisma No 4.
- Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta:CIDES.
- Mubyarto. 1988. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Komputindo.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mufti Idrus, Muh. 1992. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa, Laporan Penelitian*. Kendari: Unhalu.
- Mustopadidjaja, A. R. 1944. *Analisis Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa*. Fisipol Universitas Hasanuddin: Ujung Pandang.

- Ndraha, Taliziduhu. 1993. *Pembangunan masyarakat:Memepersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasir, MOH. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, 2004. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Nugroho. 2006. *Aspek-Aspek Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Parwoto. 2007. *Kumpulan Modul Dasar Pelatihan Para Fasilitator PN-PM-P2KP Departemen Pekerjaan Umum*. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya.
- Royat. 2007. *Pedoman Pelaksanaan Program Nasiona Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Jakarta: Lembaga Kesra RI.
- Sahdan, Gergorius. 2005. Menaggulangi Kemiskinan Desa, Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi-22 Artikel-6*. [Http://Www.Ekonomirakyat.Org](http://Www.Ekonomirakyat.Org).
- Salusu. 1966. *Suatu Analisis Tentang Proses Pengambilan Keputusan Strategis pada Tingkat Manajemen Eksekutif Puncak, Sebuah Studi Kasus pada Universitas Hasanuddin antara Tahun 1974-1982*: Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Sayogyo. 1996. *Garis Kemiskinan Dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Soemitro, Djojohadikusumo. 1985. *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini Dan Masa Depan*. Jakarta: LP3ES.
- Solihin. 1997. *Rencana Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supriyanto. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Muari Kendana.
- Suyanto, Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Permasalahannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Memberdayakan Masyarakat: Kumpulan Makalah Mengenai Inpres Desa Tertinggal*. Jakarta: Penakencana Nusadwipa.
- Sumodiningrat, Gunawan.1998. *Memangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjandraningsih. 1996. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Makalah Simposium. Jakarta: Bappenas.
- Wrihatnolo. 2007. *Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa*. Artikel. [www.-google.com](http://www.google.com).
- Vidhyandika. 1996. *Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Pendekatan Kemasyarakatan*. Artikel. [www.-wikipedia.go.id](http://www.wikipedia.go.id).

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori; (g) metode penelitian (jika naskah merupakan hasil penelitian); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (h) penutup; (i) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

Hill, Erica. 1998. Gender-Informed Archaeology: The Priority of Definition, The Use of Analogy, and The Multivariate Approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, Vol. 5, No. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

Hugo, Graeme J. et al. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*. hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

Suparlan, Parsudi. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara*. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Halu Oleo

Kampus Bumi Tri Dharma

Jalan H.E. Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3191299, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Bumi Tridharma

Jalan H.E. Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3191299 e-mail,: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com

